

## **ANALISIS KEGAGALAN TRANSISI DEMOKRASI DI MESIR PASCA-ARAB SPRING**

**Dias Maulana<sup>1\*</sup>, Vita Nur Wulan<sup>2\*</sup>, Hanida Nurul Pajriyah<sup>3\*</sup>**

\*Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

<sup>1</sup>[maulanadias967@gmail.com](mailto:maulanadias967@gmail.com), <sup>2</sup>[vitanurwulan3@gmail.com](mailto:vitanurwulan3@gmail.com), <sup>3</sup>[hanidanurul243@gmail.com](mailto:hanidanurul243@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji kegagalan transisi demokrasi di Mesir pasca-Arab Spring. Arab Spring memicu serangkaian peristiwa yang berdampak signifikan terhadap stabilitas politik Mesir. Pergeseran politik yang sudah terjadi setelah mundurnya Husni Mubarak dari kekuasaannya, tidak menampakkan kondisi demokrasi Mesir yang kembali pulih. Kemenangan Mursi dalam pemilihan umum tidak menjadi jaminan berlangsungnya proses demokratisasi yang berkelanjutan di Mesir. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kegagalan transisi demokrasi pasca-Arab Spring dan menelaah penguasaan militer dalam politik Mesir. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa akibat kegagalan peralihan demokrasi di Mesir terjadi karena perpecahan elite politik Mesir yang melahirkan sentimen polarisasi, kondisi ekonomi yang buruk serta pengaruh kuat militer, telah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi demokrasi di Mesir. Dalam hal ini, dominasi militer dalam tatanan politik Mesir telah terinstitusionalisasi, membuat peran militer dalam pemerintahan menjadi sangat signifikan.

**Kata-Kata Kunci:** *Arab Spring, Demokrasi Mesir, Militer, Ekonomi*

**Abstract :** *This article examines the failure of the democratic transition in post-Arab Spring Egypt. The Arab Spring triggered a series of events that had a significant impact on Egypt's political stability. The political shift that has occurred after the resignation of Husni Mubarak from power, does not show that the condition of Egyptian democracy has recovered. Morsi's victory in the election is not a guarantee of a sustainable democratization process in Egypt. This research focuses on an in-depth understanding of the failure of the post-Arab Spring democratic transition and examines military dominance in Egyptian politics. The results of this study indicate that the failure of the democratic transition in Egypt occurred due to the division of the Egyptian political elite which gave birth to polarizing sentiments, poor economic conditions and strong military influence, which has created an environment that is not conducive to democracy in Egypt. In this respect, military dominance in the Egyptian political order has been institutionalized making the role of the military in the government very significant.*

**Key Words :** *Arab Spring, Egyptian Democracy, Military, Economy*

### **PENDAHULUAN**

*Arab spring* (Musim Semi Arab) atau dalam bahasa arab dikenal dengan ats-Tsaurat al-Arabiyyah – Revolusi Arab yang ditandai dengan gelombang perlawanan oleh rakyat pro-demokrasi yang memperjuangkan transisi politik dikawasan timur

tengah. Menurut (Stephen R. Grand, 2011) *arab spring* dikenal sebagai masa kebangkitan dunia Arab yang ditandai dengan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi. Oleh Stephen, gelombang revolusi tersebut diyakini dapat membawa perubahan dalam masa transisi negara menuju sistem yang lebih demokratis. Gerakan ini adalah bentuk tuntutan rakyat yang mengharapkan perubahan tatanan agar menjadi masyarakat dan bangsa yang sempurna. Menurut (Ahmad, 2015) Gerakan *Arab spring* diharapkan dapat mengubah keadaan yang terjadi karena dampak pengekangan kebebasan rakyat oleh kekuasaan yang dirasa otoriter, serta adanya ketidakseimbangan antara penguasa yang hidup penuh kekayaan sedangkan rakyat dalam keadaan yang miskin.

Gerakan yang pada awalnya dipandang sebagai langkah demokratis, justru pada akhirnya tidak membuat keadaan atau era baru yang diharapkan lebih demokratis. Faktanya, hingga saat ini, negara-negara yang pernah melakukan *Arab Spring* tidak membuktikan kehidupan yang lebih demokratis dari segi hukum, politik, ataupun ekonomi. Kebanyakan pemerintahan baru yang dibentuk setelah revolusi arab cenderung kembali ke karakter asalnya, yaitu pemerintahan otoritarian. Fenomena penolakanpun terjadi karena kegagalan *Arab Spring* dalam menumbuhkan sistem demokrasi di Timur Tengah, yakni Pada dasarnya, dunia Arab cenderung resisten terhadap penerapan sistem demokrasi akibat faktor politik dan budaya yang mendasar. Artinya, konsep Arab Spring yang diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi politik dan transparansi pemerintahan belum terjadi. Sebaliknya, negara-negara Arab yang mengadopsi sistem demokrasi justru mengalami instabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. (Hasan, 2019). Sistem pemerintahan yang otoriter dan praktik politik yang sudah menjadi kebiasaan di Timur Tengah sangat sulit untuk mengubah secara revolusioner. Baik dominasi elite tunggal atau persaingan antar kelompok politik berpotensi mengarah pada konflik berkepanjangan dan penderitaan rakyat.

Serangkaian peristiwa Arab Sprig di Timur Tengah pada mulanya, diawali oleh Mohamed Bouazizi, yaitu seorang pedagang kaki lima di Tunisia. Ia melakukan aksi protes dengan membakar dirinya. Aksi tersebut timbul karena kesalahannya sesuai terjadinya penyitaan barang dagangan, pelecehan, dan penghinaan yang dilakukan oleh oknum pejabat kota dan ajudannya kepada Mohamed. Mohamed pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2011. Kematian Mohamed tersebut menjadi dampak timbulnya demonstrasi besar-besaran yang sanggup melengserkan pemerintahan presiden Tunisia, yaitu Zine El Abidine Ben Ali, peristiwa tersebut terjadi 10 hari setelah kematian Mohamed. Demonstrasi tersebut adalah sebuah awalan apa yang dinamakan dengan Revolusi Melati Tunisia yang setelah itu berkembang menjadi *Arab Spring* (Cruz, 2007). Efek yang disebabkan oleh gelombang revolusi memberikan dampak terhadap beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya adalah negara Mesir, dampak yang dirasakan yaitu jatuhnya pemerintahan Husni Mubarak. Pemerintahan Husni Mubarak telah cukup lama berkuasa di Mesir, Pada akhirnya tumbang ketika gelombang revolusi ini muncul, tepatnya tumbang pada bulan Februari tahun 2011.

Setelah tumbangya pemerintahan Husni Mubarak, terpilihlah Mursi sebagai presiden kelima, pada pemerintahan Mursi lah ditandai sebagai era baru politik dan

pemerintahan baru negara Mesir. Terdapat 13 kandidat presiden Mesir yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012, dari 13 kandidat tersislah dua nama yaitu Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Munculnya nama Ahmad Syafiq selalu menimbulkan perselisihan pada saat momen pemilu presiden Mesir. Dari awal mulanya dia mencalonkan diri, banyak orang yang menolak pencalonannya. Sebab dari penolakannya, karena dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada pemerintahan Husni Mubarak pada akhir dijatuhkan jabatannya. Walaupun pada saat undang-undang pemberhentian politik terhadap pemerintahan Husni Mubarak disahkan, faktanya nama Ahmad Syafiq masih bisa lolos di daftar pencalonan presiden.

Kesuksesan Mursi dalam memenangkan pencalonannya sebagai presiden mengalahkan Ahmad Syafiq, tentunya pertama kalinya bagi negara Mesir mempunyai seorang presiden dari golongan sipil yang terpilih melalui pemilihan umum secara demokrasi. Kemenangan seorang Mursi sebagai presiden, tidak terlepas dari dukungan ikhwanul Muslimin. Kondisi ini sebagai era baru demokratis Mesir setelah lengsernya presiden Husni Mubarak dari gelombang demonstrasi yang menentang dan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun, masa pemerintahan Mursi yang singkat diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk polarisasi politik yang tajam, tekanan ekonomi, dan tuntutan untuk melakukan reformasi yang lebih cepat, tepatnya setelah satu tahun Mursi memimpin dengan cepat dia tidak mempunyai dukungan di dalam negeri, sehingga dia mudah dikudeta oleh oknum Militer. Ternyata era baru demokrasi di negara Mesir menjadi gelap, dan pada akhirnya perubahan politik demokrasi Mesir yang dalam proses perkembangan harus mengalami kemunduran.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelaah kembali keadaan yang sebenarnya terjadi di negara Mesir yang memperlihatkan kejadian seorang pemimpin yang pada awalnya terpilih secara sah dan demokrasi, namun pada akhirnya dikudeta oleh pihak militer. Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk menganalisis mengapa terjadinya kegagalan Mesir dalam melakukan demokratisasi setelah *Arab Spring* dan mengapa militer masih menjadi otoriter dalam perpolitikan di negara Mesir.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena kudeta militer di Mesir tahun 2013 yang menghambat proses demokratisasi. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel media massa terkemuka, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana peneliti melakukan telaah mendalam terhadap berbagai literatur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menyederhanakan, dan memfokuskan pada data yang relevan

dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif yang jelas dan sistematis. Untuk memastikan validitas temuan, dilakukan verifikasi data dengan membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Dalam tahap analisis, peneliti secara sistematis mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, peneliti berusaha mengungkap pola, tren, dan hubungan sebab akibat yang mendasari fenomena kudeta militer di Mesir tahun 2013. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa upaya transisi demokrasi yang sempat berhasil dengan terpilihnya presiden sipil justru mengalami kemunduran dan kembali dikuasai oleh militer

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PROSES PERJALANAN DEMOKRASI MESIR**

Pada tahun 1922 Mesir lepas dari jajahan Inggris dan mendapatkan kemerdekaannya. Pada saat itu, kehidupan politiknya mulai terstruktur. Peraturan negara Mesir menggunakan sistem parlementer. Dengan keadaan tersebut warga sipil mempunyai kebebasan yang luas (Dunne, M., & Hamzawy, 2008). Walaupun demikian, Mesir masih terpengaruh kolonialisme Inggris dan membekas pada problematika ekonomi & sosial Mesir, karena oleh itu Mesir belum dikatakan sepenuhnya menjadi negara yang merdeka. Kondisi ini menjadi penyebab perwira gerakan bebas meng kudeta rezim monarki, pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Gamel Abdul Naseer. Pada saat itu, kepemimpinan Mesir dipimpin oleh para penguasa yang mayoritas latar belakangnya adalah seorang militer. Perkembangan demokratisasi dibawah kekuasaan Gamel Abdul Naseer sering kali muncul konflik karena kebijakan Naseer yang membatasi pengembangan komponen dasar demokrasi. Sistem yang diterapkan Naseer yaitu sistem politik sosialis yang condong menganut sebuah aliran kiri dan penghapusan paham pluralisme politik yang sudah berkembang di era monarki sebelumnya. Peraturan yang diberlakukan Naseer menggunakan sistem politik satu partai dengan pemberhentian parlemen dan melarang keberadaan kelompok yang oposisi, baik kelompok kiri ataupun islamis. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Naseer secara tidak langsung merupakan langkah strategis dirinya untuk menegaskan dominasinya dan menjadi pemimpin yang tertinggi di Mesir (Selim, 2015).

Kepemimpinan Mesir berganti setelah meninggalnya Naseer, dan digantikan oleh Anwar Sadat. Dampak yang dirasakan ketika Anwar Sadat menjadidi pemimpin yaitu berubahnya kebijakan politik, ekonomi, dan luar negeri Mesir lebih bersifat liberal yang pastinya bertolak belakang dengan kepemimpinan Naseer. Kebijakan liberalisasi yang dicetuskan oleh Anwar Sadat salah satunya adalah *Infitah* (pintu terbuka) yang diterapkan untuk menaikkan investasi asing. Maka dari itu pada kekuasaan Anwar, liberalisasi ekonomi saling terkait dengan perubahan politik luar negeri Mesir, dari Uni Soviet ke Amerika Serikat. Dampak perubahan orientasi politik luar negeri Mesir menuju Barat telah memunculkan konsekuensi internal,

yang mengharuskan Mesir mengevaluasi kembali komitmennya terhadap demokratisasi, sejalan dengan tekanan dari Amerika Serikat yang menganut sistem demokrasi. Anwar memperkenalkan sistem multi partai yang berfungsi untuk meningkatkan liberalisasi politik. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya undang-undang 40 Tahun 1977, undang-undang ini membuka jalan bagi pembentukan partai-partai politik baru yang mewakili berbagai ruang lingkup spektrum ideologi, seperti Partai Sosial Liberal yang berhaluan kanan, Partai Uni Nasional Progresif yang berhaluan kiri, serta Partai Buruh, Partai Wafd Baru, dan Partai Sosialis Mesir yang menempati posisi tengah

Dalam upaya konsolidasi kekuasaan perpolitikannya, Sadat menginisiasi pembentukan Partai baru yaitu Partai Nasional Demokratik (*Hizb Al wathani Al-dimuqrati*) sebagai kendaraan politiknya (Alfian, S., & Nazaruddin, 1988). Kebijakan Sadat dalam memimpin pemerintahan hampir sama dengan pemimpin sebelumnya yaitu Naseer. Kebijakan yang dikeluarkan Sadat yaitu memilih untuk membatasi peran oposisi, partai individu dan media dalam mengeluarkan sejumlah putusan pembatasan represi (Selim, 2015). Latar belakang yang menjadi alasan perubahan politik yaitu pada awal kepemimpinan Sadat di Mesir. Pada mulanya didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi krisis politik, Sadat berupaya keras untuk mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Dia mengambil langkah yang sangat luar biasa dengan mengubah gaya kepemimpinannya yang otoriter menjadi lebih demokratis, meskipun dia sadar akan menghadapi kesulitan yang akan dihadapinya. Keadaan Mesir tidak membaik pada saat disahkannya sebuah kebijakan pembatasan subsidi yang menjadi dampak munculnya demonstrasi yang sangat besar dan bentrokan di beberapa kota di Mesir pada tahun 1977. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 79 jiwa, 1.000 orang terluka, dan 1.250 orang ditahan (Yumitro, G., & Estriani, 2017).

Pada saat parade militer di Kairo terjadi pembunuhan terhadap Sadat, tepatnya 6 Oktober 1981 yang dilakukan oleh partisipan *Al-Jihad* yang sukses menyelipkan ke dalam kelompok militer Mesir, yaitu Tarek Al-Zumur dan Khaled Islambuli keduanya sebagai dalang dalam pembunuhan. Terbunuhnya Sadat merupakan pembunuhan dengan cara yang belum pernah ada, sehingga seluruh dunia terkejut akan peristiwa pembunuhan tersebut (Kahana, E., & Stivi-Kerbis, 2014). Kelompok *Al-Jihad* yang membunuh Sadat, yaitu kelompok yang bersifat radikal dan fundamental yang pernah terluka dan memiliki dendam yang sangat dalam terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Anwar Sadat. Setelah kematian Sadat, kursi kepemimpinan di tempati oleh Husni Mubarak. Dia merupakan seorang pemimpin yang menetapkan kebijakan sebagai alat pemulihan keseimbangan. Dengan strategi yang diterapkan ini, Mubarak membebaskan tahanan politik mengumumkan rekonsiliasi nasional di antara saingannya dalam politik. Dia juga memberikan kebijakan kebebasan yang lebih besar bagi pers untuk membangun partai-partai politik.

Pemerintahan Mubarak ditandai oleh konsentrasi kekuasaan yang bermakna di tangan militer, sebagaimana tercermin dalam pembentukan Dewan Agung Militer

(SCAF). Partai Nasional Demokrat (NDP), yang secara efektif merupakan alat politik militer, mendominasi ranah politik formal. Kelompok sekuler-liberal, meskipun memiliki pengaruh, beroperasi dalam kerangka yang ditetapkan oleh rezim, dengan beberapa anggotanya menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Meskipun menunjukkan beberapa karakteristik demokrasi elektoral, proses transisi demokrasi pada masa kepemimpinannya dihadapkan pada berbagai permasalahan, termasuk kelemahan partai oposisi dan organisasi masyarakat sipil, kesulitan mencapai transisi damai, maraknya korupsi, kebijakan yang menghambat liberalisasi, dan ancaman kekerasan.

Pasca lengsernya Mubarak, kekuasaan eksekutif di Mesir secara resmi dialihkan ke Dewan Agung Militer (SCAF). Keputusan ini memicu gelombang protes yang menuntut SCAF segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis (KomNasKDM, 2014). Di bawah tekanan masyarakat nasional ataupun internasional yang meminta masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kekuasaan politik, SCAF kemudian mengadakan pemilu legislatif dan presidensial, namun dengan sejumlah mekanisme yang menguntungkan kepentingan militer.

### **PERGULATAN POLITIK MESIR DI ERA PRESIDEN MURSI**

Negara Mesir memulai demokratisasi dengan pemilihan umum (pemilu) parlemen sesudah berakhirnya kepemimpinan Mubarak. Pemilu parlemen tersebut dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap pertama pada tanggal 28 November 2011, tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2011 dan tahap terakhir dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2012. Dari dilaksanakan pemilu tersebut munculah pemenangnya yaitu Partai Kebebasan dan Keadilan (*Fredoom and justice Party - FJP*) yang berhubungan dengan Gerakan Ikhwanul Muslimin (IM). Namun demikian, parlemen hasil pemilu tersebut dibubarkan pada tanggal 12 Juni 2012 oleh SCAF. Pembubaran parlemen tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Mahkamah Konstitusi Agung (*Al Mahkama Al Dustūriya El 'Ulyā - Supreme Constitutional Court - SCC*) yang menyatakan bahwasannya pemilu anggota parlemen telah menyalahi aturan undang-undang dasar.

Setelah itu, ditahun 2012 pada pemilu presiden Mesir, Mursi memenangkan pemilu ini dari kandidat lain yaitu Ahmad Shafiq. Pada awalnya, rakyat menganggap kemenangan Mursi sebagai presiden akan memberikan harapan bagi rakyat Mesir untuk mendongkrak keberhasilan perubahan demokrasi pertama setelah *Arab Spring* 2011. Namun demikian, sepertinya Mesir harus merasakan pergulatan politik yang lebih sulit. Demokratisasi yang diharapkan rakyat dapat berkembang setelah berakhirnya masa jabatan Husni Mubarak, akan tetapi semua hal tidak sepenuhnya terwujud. Pada kepemimpinan Mursi, Mesir harus menjumpai berbagai macam masalah dari masalah politik, ekonomi, dan sosial, semua masalah tersebut sudah berakar sejak pemerintahan Mubarak. Tantangan yang dihadapinya bukan hanya datang dari rakyat, tetapi juga dari struktur kekuasaan yang kuat dan sulit digoyahkan, warisan pemerintahan Mubarak yang telah membentuk sistem pemerintahan yang kompleks dan mengakar di Mesir diruang lingkup politik, ekonomi, dan sosial atau disebut dengan system “*deep state*” atau Bahasa

arabnya dikenal dengan sebutan “*Daulat al-Umqi*”. Sistem *Deep State* atau *Daulat al-Umqi* adalah sebuah system kekuasaan yang tersembunyi yang dikontrol dan diawasi oleh sekelompok utama yang terdiri dari elit militer, tokoh berpengaruh, pembisnis, dan juga media massa. Secara umum *deep state* diartikan sebagai sebuah sistem yang memiliki karakter yang totaliter dan tidak menerima adanya kelompok oposisi. (Mushlih, A., 2017).

Dinamika kepemimpinan politik negara Mesir tidak kunjung membaik. Sistem perpolitikan Mesir semakin memburuk dengan perpecahan antara kelompok revolusioner yang memiliki latarbelakang sekuler dengan kelompok islam. Ketika awal Mursi berkuasa, perpecahan politik di antara elit Mesir mulai terjadi dan bahkan menjadi tantangan utama bagi kebijakan Mursi. Langkah awal yang Mursi lakukan sejak dilantiknya sebagai presiden yaitu mencetuskan dekrit yang bertujuan untuk memunculkan kembali posisi parlemen (*Majlis As-Sha'ab*) yang sudah lama mati dan dianggap sebagai inkonstitusional oleh *Supreme Constitutional Court* (SCC) pada 14 Juni 2012, SCC adalah Mahkamah Konstitusional Mesir yang bubarkan oleh SCAF pada 16 Juni 2012. Mursi melakukan langkah tersebut supaya para anggota parlemen melakukan tugasnya kembali yaitu sidang. Selain hal tersebut, Mursi akan menyelenggarakan pemilihan umum selama 60 hari setelah pembentukan konstitusi baru yang diselesaikan oleh Dewan Konstituante yang berjumlah 100 anggota, Penyelenggaraan pemilu tersebut dinyatakan oleh Mursi melalui Dekret Presidennya. Tugas dari Dewan Konstituante yaitu merancang konstitusi baru dalam kurun waktu 6 bulan. Tetapi, langkah yang dilakukan oleh Mursi dianggap tidak sah oleh SCC. Mahkamah Konstitusi Mesir membuat pernyataan bahwa tidak ada banding dalam keputusan pembubaran anggota parlemen. Konstitusi Mesir beranggapan langkah yang dilakukan itu tidak sah dan merupakan pelanggaran hukum jika masih diteruskan.

Pada 1 Juli 2013 militer memberikan ultimatum kepada Mursi guna segera memecahkan masalah politik di Mesir dalam jangka waktu 48 jam dikarenakan Mursi sudah tidak mampu menyelesaikan konflik pemerintahan. Dengan ancaman intervensi, militer menekan Mursi untuk memenuhi tuntutananya. Berdasarkan hal tersebut, karena merasa mandatnya sebagai presiden diperoleh secara demokratis, Mursi dengan tegas menolak ultimatum tersebut. Tetapi pada akhirnya militer tetap menjalankan ultimatumnya dengan menggulingkan Mursi dari jabatannya pada 3 Juli 2013. Kudeta militer ini mengakibatkan berakhirnya pemerintahan Mursi yang terpilih secara demokratis dan menyeretnya menjadi tahanan militer beserta para aparatnya (Basyar, 2015).

Melihat fenomena yang terjadi di Mesir merupakan manifestasi paling jelas dari teori pretorian, khususnya dalam ranah korelasi antara militer dan sipil pada saat itu. Sangat terlihat dengan jelas, militer telah menempati posisi sentral dalam struktur kekuasaan politik Mesir, menjadi aktor yang paling berpengaruh. Sebagaimana dipahami dalam teori pretorian, peran militer yang sangat dominan didalam politik suatu negara, bahkan bisa mengambil alih kekuasaan. Kudeta militer di Mesir adalah contoh klasik dari dominasi militer dalam politik dan mengambil alih kekuasaan sipil yang dipilih secara demokratis. Pilihan untuk menjadi pemimpin politik sangat terbatas, dengan persyaratan yang menuntut latar belakang sebagai militer atau memiliki hubungan erat dengan kalangan

mliter (Kosak, U., dkk. 2018). Presiden Mursi mudah untuk masuk kedalam politik Mesir, tetapi yang pasti posisi yang paling kuat didalam politik adalah militer. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui dominasi militer dalam politik Mesir merupakan fenomena kompleks yang akarnya tertanam dalam sejarah dan struktur sosial negara. Meskipun terdapat upaya untuk mengurangi pengaruh militer dalam politik, namun realitasnya menunjukkan bahwa militer tetap menjadi aktor yang sangat berpengaruh.

### **PERPECAHAN KELOMPOK ELITE POLITIK**

Latar belakang yang menyebabkan kegagalan demokrasi di Mesir yaitu perpecahan di kalangan elite politik pada masa transisi Presiden Mursi. Kondisi ini terbukti dari ketidakmampuan para pemimpin politik Mesir untuk mencapai kesepakatan mengenai siapa yang berkuasa, dan situasi politik yang menjadi tidak stabil. Perpecahan yang terjadi karena ketidakmampuan untuk membangun koalisi yang solid antara kelompok islam dan kelompok liberal-sekuler dalam mendukung pemerintahan yang dipilih secara demokratis telah melemahkan legitimasi pemerintahan Presiden Mursi. Dominasi kedua kelompok ini sangat berpengaruh dalam menciptakan dinamika perpolitikan Mesir. Hal tersebut telah memicu konflik berkepanjangan dan mengakibatkan negara Mesir menjadi tidak stabil. Militer Mesir pada periode antara dua perang dunia mengalami pembatasan yang signifikan dalam hal pengembangan dan otonomi. Akibatnya, institusi ini tidak memiliki kapasitas untuk menjadi aktor yang berpengaruh dalam politik domestik maupun internasional (Kordunsky, A., & Lokesson, 2013). Pada tahun 1881, tepatnya pada abad sebelumnya, terjadi sebuah peristiwa kudeta terhadap pemerintahan pada masa itu yang dipimpin oleh Kolonel Ahmaad Urabi dan para pasukannya. Kudeta ini dilakukan untuk membela rakyat Mesir yang ingin lepas dari kekuasaan orang Turki dan pengaruh asing dalam perekonomian. Peristiwa ini dijadikan oleh masyarakat Mesir sebagai kudeta mulia karena memperjuangkan tujuan nasionalis dan menjadi sebuah dongeng di negara Mesir.

Berbagai gerakan dan organisasi islam berkembang di negara Mesir, karena Mesir termasuk negara dengan mayoritas penduduk beragama islam. Perjalanan kelompok Gerakan islam mulai nampak setelah lengsernya pemerintahan Husni Mubarak yang pada saat itu mulai merambah kedalam kancah politik praktis. Kelompok islam Ikhwanul Muslimin lah yang dimaksud disini, kelompok yang membangun Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Parrrty-FJP*) dan sukses memenangkan pemilu parlemen. Selain kelompok Ikhwanul Muslimin, ada pula kelompok islam lainnya yaitu kelompok Salafi. Kelompok ini membangun partai yang bernama *An-Nur* dan institut Al-Azhar yang sampai kini menjadi pusat dalam hubungan agama dan negara (Ghafur, 2016). Munculnya kekuatan islam pada saat Anwar Sadat memimpin Mesir. Pengaruh nilai-nilai islamisme tidak hanya meresap kedalam kehidupan masyarakat, tetapi sudah merambah kedalam institut negara. Keduanya, Sadat dan Mubarak ketika menjadi pemimpin Mesir secara strategis menggunakan unsur-unsur agama untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Meningkatnya pengaruh politik islam telah memicu kekhawatiran dikalangan kelompok liberal sekuler, yang merasa terancam oleh kebangkitan islam yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara seperti kebebasan dan

kewarganegaraan. Kekuatan politik Islam yang dominan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas demokrasi Mesir. Konflik antara kelompok Islam dan liberal sekuler pun semakin memanas, membuat kelompok sekuler semakin terdesak.

Kegagalan koalisi penghalau kekuatan pemerintahan Mubarak yang bersepakat menghalangi kemenangan Ahmed Shafiq menjadi penyebab dari perpecahan elit politik di Mesir yang tidak dapat diselesaikan. Mursi sebagai presiden terpilih di Mesir tidak memanfaatkan momen tersebut dengan baik. Mursi menolak koalisi tersebut karena adanya perbedaan ideologis dalam sebuah perumusan konstitusi Mesir. Tidak hanya itu, perpecahan timbul karena dominasi kelompok Ikhwanul Muslimin dalam Dewan Konstituante yang mempunyai prinsip menolak sekularisme dan nilai-nilai barat. Sementara itu, dalam keterlibatannya kelompok Salafi menggunakan nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan hukum dalam bernegara. Sikap yang diberikan oleh kedua kelompok tersebut mengakibatkan proses perumusan konstitusi menjadi rumit. Konsisi ini membuktikan bahwa tanpa adanya komitmen kuat dari elit politik untuk besatu, nilai-nilai demokrasi yang diharapkan sulit terwujud (Wangke, 2014).

Demokrasi Mesir menjadi bergejolak karena adanya perpecahan antar kelompok Islam dan kelompok liberal-sekuler. Konflik semakin tajam setelah kelompok sekuler menunjukkan penentangan yang kuat terhadap pemerintahan Mursi. Oleh sebab itu, melemahnya perpolitikan Mesir karena terpecah belahnya koalisi. Sehingga factor kegagalan demokrasi Mesir yaitu perselisihan tersebut. Dalam hal ini, terjadinya perselisihan tidak bisa dihindari dari pengaruh peran SCAF yang memegang otoritas dimasa transisi. Seharusnya, situasi tersebut bisa diatasi dan politik menjadi stabil, apabila bersatunya kelompok elite politik pasca pemilu. Adanya sepeerti mekanisme pembagian kekuasaan yang mengakomodasi berbagai kepentingan politik membuat militer sulit merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil yang sah dan kuat. Ketika partai politik dan elit sipil mengalami perpecahan dan lemah, militer seringkali memanfaatkan situasi tersebut untuk ikut campur dalam urusan politik (Diamond, L., & Marc, 2001). Hal ini menunjukkan Tindakan politik yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi adanya kemunduran demokrasi di Mesir.

### **KONDISI PEREKONOMIAN MESIR**

Posisi geografis Mesir terletak di persimpangan jalan antara Afrika dan Asia dan terusan Suez yang menghubungkan laut Mediterania dan laut Tengah yang tersambung ke samudra Hindia. Sejarah yang terekam dan letak geografis yang strategis merupakan keuntungan bagi perekonomian Mesir hingga kini Abdul Nasser yang kemudian dilanjutkan oleh Anwar Sadat dan Mubarak. Pada masa Pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser, perekonomian Mesir sangat terpusat terutama kebijakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Nasser yaitu dalam memperkuat pengawasan sektor penting seperti perdagangan, perbankan, dan transportasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing. Namun hal ini menghasilkan sistem ekonomi yang sangat birokratis dan diawasi oleh negara.

Setelah Nasser, Anwar Sadat sebagai penggantinya meluncurkan kebijakan "*infithah*" yaitu dikenal sebagai kebijakan pembukaan ekonomi dengan tujuan menarik

investasi asing dan mengurangi kendali negara, meskipun masih tetap memiliki batasan yang ketat. Saat kepemimpinan Mubarak, ia masih mempertahankan kebijakan ini akan tetapi masih tetap menjaga peran dominan negara, terutama keluarga Mubarak yang memegang kontrol di banyak sektor ekonomi. Dalam hal ini pemerintah tetap menguasai sektor publik dengan pengaruh swasta terutama modal asing yang sangat terbatas. Sebenarnya, upaya modernisasi dan industrialisasi dihambat oleh keterbatasan keterlibatan investor asing dan modal swasta. Meskipun ada usaha atau upaya untuk membuka ekonomi, birokrasi, dan regulasi yang ketat membuat Mesir kurang menarik bagi investor asing yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya transformasi ekonomi negara Mesir. Adapun faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Mesir adalah keterlibatan Mesir dalam empat perang Arab-Israel tidak hanya berdampak pada politik dan keamanan negara, berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional negara Mesir. Ketika suatu negara terlibat dalam perang sumber daya besar yang harusnya dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi dialihkan untuk tujuan (Sihbudi, M. Riza, 1995).

Pada tahun 2004-2008, presiden Husni Mubarak menerapkan reformasi ekonomi yang agresif untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Mesir. Reformasi ini mencakup liberalisasi sektor ekonomi, penurunan tarif pajak, dan regulasi untuk mendorong sektor swasta dan menarik lebih banyak investasi internasional. Langkah tersebut telah membuahkan hasil positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Krisis keuangan global berdampak besar pada banyak negara, termasuk Mesir yang mengalami keterpurukan ekonomi. Tingkat pertumbuhan PDB Mesir menurun menjadi 4,5 % pada tahun 2009, yang menunjukkan dampak situasi ekonomi global terhadap ekonomi nasional.

Perekonomian Mesir memiliki ketergantungan pada beberapa sektor utama seperti pertanian, minyak bumi, media, dan pariwisata, dan pekerja imigran. Meskipun ekspor minyak dan pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, pekerja imigran juga merupakan sumber devisa utama negara Mesir. Sekitar 3 juta pekerja imigran Mesir tersebar di negara-negara seperti Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Pada sektor pertanian Mesir menghadapi tantangan besar, antara lain yaitu terbatasnya lahan pertanian dan ketergantungan pada sungai Nil sebagai sumber air dan irigasi utama. Dalam hal ini, berdampak besar pada ketahanan pangan dan potensi pertanian dalam negeri. Mesir merupakan salah satu penerima bantuan luar negeri terbesar dari Amerika Serikat, terutama setelah perang Irak, dan memberikan pengaruh politik dan ekonomi Mesir di wilayah tersebut. Sejak tahun 1979 Mesir menerima bantuan luar negeri dalam jumlah besar, rata-rata 2,2 miliar dolar per tahun nya. Menurut Peterson Institut for International Economic, masalah utama Mesir adalah pengangguran dikalangan muda. Tingkat penyerapan tenaga kerja hanya sekitar 4% per tahun, dan pengangguran lulusan perguruan tinggi hampir sepuluh kali lipat lebih tinggi. Pada akhir tahun 2010, sekitar 40% dari populasi mesir yang berjumlah kurang dari 80 juta jiwa hidup dengan pendapatan per kapita sekitar 2 dollar Amerika Serikat per hari.

Kehidupan masyarakat Mesir sangat kontras dengan gaya hidup mewah para elit yang diperkaya oleh praktik korupsi oleh kroni-kroni Presiden Husni Mubarak. Selama pemerintahannya, korupsi di kementerian dalam negeri semakin meningkat karena

struktur kelembagaan yang memberikan kekuasaan besar dan legitimasi yang memperpanjang masa jabatan presiden. Di tubuh National Democratic Party (NDP), kelompok bisnis besar, atau *the party of big business*, memainkan peran penting, memicu kemarahan publik terhadap sosok seperti mantan Perdana Menteri Ahmed Nazif. Salah satu contohnya adalah Ahmed Ezz, sekutu Mubarak yang memonopoli industri baja mesir dan menguasai lebih 60% pangsa pasar.

Ketimpangan ini kian terasa dengan kekayaan keluarga Mubarak yang diperkirakan bernilai antara 40-70 miliar dollar AS, sementara sekitar 40% rakyat mesir hidup dibawah garis kemiskinan. Perbedaan ini menjadi faktor utama ketidakpuasan rakyat yang puncaknya tercermin dalam gelombang protes pada Arab Spring 2011. Rakyat turun ke jalan menuntut “food, freedom, and human dignity,” menggemakan seruan rakyat Tunisia sebelumnya. Demonstrasi tersebut melambangkan keinginan akan perubahan dari pemerintah yang korup dan represif menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera (Sika, 2014).

Stabilisasi politik Mesir sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian negara tersebut yang merupakan faktor kunci dalam kelangsungan demokrasi. Masyarakat menyerukan kemakmuran dari Presiden Mursi, namun tidak terlihat perubahan besar dalam perbaikan ekonomi, dan terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran pun pecai di berbagai wilayah. Mursi dinilai gagal dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya seperti yang diharapkan. Kekecewaan publik ini kemudian dijadikan alat oleh pihak oposisi untuk menggalang perlawanan terhadap pemerintahannya. Situasi tersebut akhirnya berujung pada kudeta militer dan Mursi digulingkan dari kekuasaannya sebagai Presiden Mesir.

Pasca revolusi dan penggulingan Husni Mubarak, terdapat harapan besar di kalangan masyarakat Mesir terhadap pemulihan ekonomi dan kemajuan proses demokrasi. Namun realitas pemerintahan Mursi memiliki kemiripan dengan rezim-rezim sebelumnya, khususnya pada gaya pemerintahannya yang cenderung otoriter dan tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menekankan bahwa keberhasilan transisi demokrasi Mesir sangat bergantung pada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warganya secara merata.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun demokratisasi *Arab Spring* pada mulanya diyakini dapat membawa dampak yang baik, namun nyatanya perjalanan demokratisasi negara di Timur Tengah khususnya di negara Mesir tidak berjalan dengan mulus. Transisi demokrasi di Mesir diwarnai dengan konflik elit politik yang berkuasa. Sehingga perpolitikan di Mesir paca-*Arab Spring* pada kenyataannya tidak berdampak baik pada demokratisasi Mesir. Penerapan demokrasi di Mesir pasca-Arab Spring menemukan beberapa hambatan. Pertama, kesungkanan elit polotik dalam menyamakan frekuensinya untuk mewujudkan pemerintahan yang maju dan demokratis. Hubungan yang sudah tidak sehat antara kubu liberal-sekuler dengan kelompok islam, sehingga menimbulkan terjadinya penentangan. Kondisi tersebut yang menjadikan situasi negara Mesir menjadi tidak stabil, maka dari itu kehidupan demokrasi di Mesir sering menjadi wadah persaingan terbuka dan perebutan

doktrin kedua kelompok tersebut. Kedua, lemahnya ekonomi menjadi faktor utama dalam stabilitas suatu pemerintahan. Mesir mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat tajam pasca-*Arab Spring*, tidak hanya ekonomi, tatanan Masyarakat yang menjadidi senjang. Sehingga menimbulkan berbagai konflik disetiap daerah. Tuntutan kesejahteraan masyarakat Mesir yang dipicu oleh inflasi tinggi menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menggerogoti stabilitas politik dan mengancam keberlangsungan proses demokrasi di negara tersebut. Ketiga, yang menjadi hambatannya yaitu Kudeta militer di Mesir telah menggagalkan upaya membangun negara yang demokratis dan memberikan pukulan telak terhadap kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Selain itu, sejak runtuhnya monarki pada tahun 1952, militer Mesir telah memiliki kedudukan istimewa dan pengaruh yang kuat dalam politik dan ekonomi negara. Hal ini membuat militer menjadi aktor kunci dalam pemerintahan Mesir. Oleh karena itu, tatanan ini membuat peran militer tidak bisa diputuskan kaitannya dari politik nasional Mesir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4((2)), 120–121. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-%0A129>
- Alfian, S., & Nazaruddin, A. I. P. I. (1988). *Masa depan kehidupan politik Indonesia*.
- Basyar, M. H. (2015). *Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel*. Jakarta: UI-Presss, 198.
- Cruz, G. (2007). *Only a day in Tunisia*. 32.
- Diamond, L., & Marc, F. P. (2001). *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. PT Grafindo Persada.
- Dunne, M., & Hamzawy, A. (2008). The Ups and Downs of Political Reform in Egypt. *Carnegie Endowment for International Peace. Arnegie Endowment for International Peace.*, 17-44.
- Ghafur, M. F. (2016). Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya. *Jurnal Penelitian Politik.*, 11.(2.), 16.
- Grand, S. R. (2011). *Starting from Egypt: The Fourth Wave of Democratization*. (Online).
- Kahana, E., & Stivi-Kerbis, S. (2014). The Assassination of Anwar Al-Sadat: An Intelligence Failure. *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, 183–185.
- KomNasKDM. (2014). *Tragedi kemanusiaan Pasca Kudeta Militer di Mesir*.
- Kordunsky, A., & Lokesson, M. (2013). *The Egyptian Military's Huge Historical Role*. Retrieved from National Geographic.

- Kosak, U., Brus, B., Knez, D., Zakelj, S., Trontelj, J., Pislar, A., ... & Gobec, S. (2018). The magic of crystal structure-based inhibitor optimization: development of a butyrylcholinesterase inhibitor with picomolar affinity and in vivo activity. *Journal of Medicinal Chemistry*, 61(1), 119-139.
- Mushlih, A., & H. (2017). Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir tahun 2011-2013. *Jurnal Politik*, 2(1), 3.
- Selim, G. M. (2015). The international dimensions of democratization in Egypt. *Switzerland: Springer International Publishing*.
- Sihbudi, M. Riza, D. (1995). *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Pustaka Jaya.
- Sika, N. (2014). *The Arab State and Sosial Contestation Beyond the Arab Spring : The Evolving ruling Bargain in the Middle East*. Oxford University Press.
- Wangke, H. (2014). Kajian Singkat Terhadap Isu-isu Terkini, Efektivitas Kesepakatan Code of Conduct Indonesia-Australia. *Info Singkat Hubungan Internasional*.
- Yumitro, G., & Estriani, H. N. (2017). The Quo Vadis of Democratization in Post-Egypt Arab Spring. *Croatian International Relations Review*, 23(79), 157-188.

